



LAPORAN KINERJA

SEKERTARIAT DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN

2026 | TRIWULAN 1



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Miftahul Huda

Penyusun:

R. Tomi Supratomo

Luh Putu Ayu Damayanti

Chairiyanti

Punto Apri Sembodo

Elvanri Anggi Widiанти

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan

KATA PENGANTAR

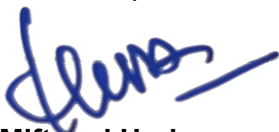
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK) Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PK dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah – langkah strategis Setditjen PK pada Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PK dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PK, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, April 2026



Miftanul Huda

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK) Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PK dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PK terdapat 17 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PK. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PK Triwulan I Tahun 2026 sebesar **112,74 (Istimewa)**.

Pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target triwulanan. Berdasarkan target tersebut 2 indikator kinerja berhasil tercapai yakni Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%) dengan capaian 85,44 serta Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%) dengan capaian 99,48.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	Triwulanan	81	81	85,44	105,48
	2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)	Tahunan	-	<0,5	-	-
	3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	Tahunan	-	76	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
	4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	Tahunan	-	81	-	-
	5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	70	-	-
	6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai)	Semesteran	-	89	-	-
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	Tahunan	-	81,5	-	-
	8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	3,5	-	-
	9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	Tahunan	-	65	-	-
	10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	Semesteran	-	80	-	-
	11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	Tahunan	-	91	-	-
	12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	77	-	-
	13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	Semesteran	-	100	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
	14 .	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	Tahunan	-	80	-	-
	15 .	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	Triwulanan	74	76	99,48	120
	16 .	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	91	-	-
	17 .	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PK Tahun 2026 adalah Rp58.143.504.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PK mencapai Rp 13.230.668.997 atau 22,76%.

Secara umum, berdasarkan kondisi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2026 tidak menghadapi tantangan yang signifikan. Namun, sebagai langkah peningkatan kinerja Setditjen PK ke depan, direkomendasikan percepatan penyelesaian sisa tindak lanjut rekomendasi APIP Triwulan I Tahun 2026 serta penguatan sinergi dengan Direktorat dan UPT guna mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DJPK.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.4 ISU STRATEGIS	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	11
IK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	12
IK 2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%).....	14
IK 3. Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	16
IK 4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%).....	18
IK 5. Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	20
IK 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)	24
IK 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	26
IK 8. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	29
IK 9. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	31

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	36
IK 11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	42
IK 12. Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	44
IK 13. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	47
IK 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	51
IK 15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	54
IK 16. Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	56
IK 17. Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	59
3.2 Akuntabilitas Keuangan	63
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Rekomendasi	66
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan I Tahun 2026	9
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja Setditjen PK Tahun 2026.....	6
Tabel 2.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 3.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 4.	Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026	15
Tabel 5.	Capaian IK Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026	17
Tabel 6.	Capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 7.	Kategori Nilai PM SAKIP	21
Tabel 8.	Capaian IK Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 9.	Bobot Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	25
Tabel 10.	Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai) Tahun 2025	25
Tabel 11.	Bobot Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)..	27
Tabel 12.	Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 13.	Kerangka Maturitas SPIP	30
Tabel 14.	Capaian IK Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai) Tahun 2025.....	30
Tabel 15.	Capaian IK Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026.....	34
Tabel 16.	Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks) Triwulan I Tahun 2026	40

Tabel 17. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026	43
Tabel 18. Capaian IK Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026	45
Tabel 19. Capaian IK Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%) Triwulan I Tahun 2026.....	47
Tabel 20. Capaian IK Pengawasan Kearsipan Internal DJPK Triwulan I Tahun 2026	53
Tabel 21. Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%) Tahun 2025.....	55
Tabel 22. Nilai dan Predikat atas Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	57
Tabel 23. Capaian IK Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026	58
Tabel 24. Capaian IK Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%) Triwulan I Tahun 2026.....	60
Tabel 25. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan IV Tahun 2025	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	67
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan, mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara berkala. Dalam implementasinya, penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pedoman teknis dalam penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan ini juga memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tata cara evaluasi AKIP secara nasional maupun internal instansi pemerintah. Selain itu, penyusunan dan pengukuran kinerja organisasi turut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi yang menekankan pengelolaan kinerja organisasi secara holistik pada tingkat kementerian/lembaga hingga unit organisasi.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi pedoman

dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja organisasi. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini memuat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026, termasuk analisis terhadap pencapaian indikator kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Melalui penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akuntabel dan terukur mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan I Tahun 2026.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;

3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
9. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

1.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029, Setditjen PK berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPK guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi DJPK, melalui:

1. Meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi, serta mendorong keterpaduan antara perencanaan program,

- penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional;
2. Mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan efisien;
 3. Mendorong pembentukan aparatur yang profesional melalui penguatan implementasi manajemen talenta ASN DJPK sebagai Human Capital dan akselerasi program DJPK, serta memperkuat implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis, budaya kerja adaptif, dan pelayanan publik yang prima;
 4. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya melalui proses perumusan yang partisipatif dan berbasis bukti, termasuk penguatan advokasi dan penyediaan informasi hukum yang responsif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan;
 5. Mengembangkan strategi komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif untuk mendukung citra positif KKP dan DJPK, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
 6. Meningkatkan efisiensi dukungan layanan internal seperti urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip tata kelola yang baik;
 7. Mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;
 8. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern dalam menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas nasional dan kinerja KKP melalui pengawasan berbasis manajemen risiko, pengembangan teknologi informasi manajemen pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan dan sinergi pengawasan dengan instansi lain;
 9. Mewujudkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal; dan;
 10. Menganalisis dan mensinergikan perumusan kebijakan serta mendiseminasikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan efektivitas pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tahun 2025-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Triwulan I Tahun 2026 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP penjabaran dan penyelarasan antara Sasaran Strategis, indikator Kinerja, dan Target Kinerja Organisasi menggunakan Penjenjangan Kinerja. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026. Dokumen RKT 2026 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Setditjen PK Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	81
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)	<0,5
		3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	77
		4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	82
		5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	72
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)	89,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	81,75
		8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	3,6
		9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	66
		10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	80
		11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	91
		12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	78
		13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	100
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	81
		15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	77
		16.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	92
		17.	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	100

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sebagai unit organisasi level dua yang melaksanakan tugas pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan juga mendukung kinerja mandatory lingkup KKP. Kinerja mandatory tahun 2026 antara lain :

1. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI
2. Nilai pembangunan integritas
3. Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis

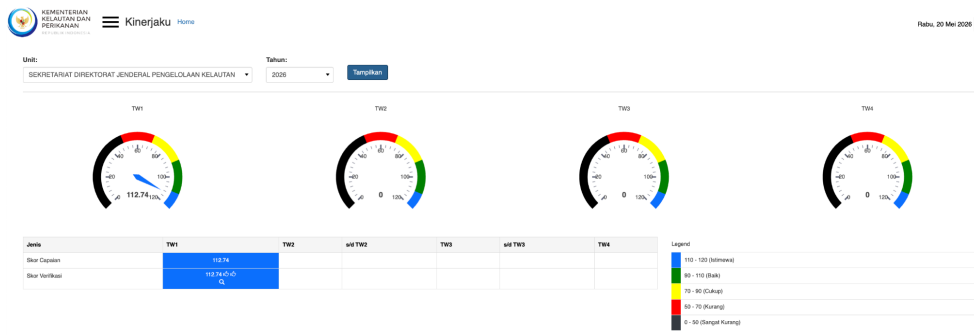
4. Penilaian mandiri SAKIP
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
7. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP
8. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP
9. Indeks Profesionalitas ASN
10. Tingkat kepatuhan pengelolaan data
11. Nilai proposal inovasi pelayanan publik
12. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
13. Nilai pengawasan kearsipan internal
14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP

Untuk mendukung kinerja pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Setditjen PK menetapkan indikator diluar mandatory yang ditetapkan oleh KKP yaitu:

1. Nilai keterbukaan informasi publik DJPK
2. Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PK terdapat 17 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PK. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PK Triwulan I Tahun 2026 sebesar **112,74 (Istimewa)**.



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 1. Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan I Tahun 2026

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
					Capaian	% (Kinerjaku)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan	Triwulanan	81	81	85,44	105,48

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut		Kinerja DJPK (%)					
	2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)	Tahunan	-	<0,5	-	-
	3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	Tahunan	-	76	-	-
	4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	Tahunan	-	81	-	-
	5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	70	-	-
	6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai)	Semesteran	-	89	-	-
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	Tahunan	-	81,5	-	-
	8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	3,5	-	-
	9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	Tahunan	-	65	-	-
	10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	Semesteran	-	80	-	-
	11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	Tahunan	-	91	-	-
	12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	77	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
	13 .	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	Semesteran	-	100	-	-
	14 .	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	Tahunan	-	80	-	-
	15 .	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	Triwulanan	74	76	99,48	120
	16 .	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	91	-	-
	17 .	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-

3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PK, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%), 2) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%), 3) Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai), 4) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%), 5) Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai), 6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai), 7) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai), 8) Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai), 9) Persentase penyelesaian proses

bisnis dan SOP DJPK (%), 10) Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks), 11) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%), 12) Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai), 13) Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%), 14) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai), 15) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%), 16) Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai), 17) Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%).

IK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) di Ditjen Pengelolaan Kelautan. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Formula perhitungan:

$$X_{\text{rekomendasi}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- $X_{\text{rekomendasi}}$: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jenderal PK
- A : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PK
- B : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal PK

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
85,77	85,44	-0,33	105,48	81%	105,48%	81%	84%	101,71%

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 582/ITJ.0/RC.610/IV/2026, capaian IKU persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah di tindaklanjuti (tuntas) pada triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen PK sebesar 85,44% dan berhasil melampau target yakni sebesar 81%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Berdasarkan hasil capaian indikator ini pada tahun triwulan I tahun 2026 (85,44%) lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 (85,77%) hal ini disebabkan karena, rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan triwulan I tahun 2026.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK maka, capaian pada tahun 2025 (85,44%) telah berhasil melampaui Target Renstra DJPK 2025 – 2029 (84%).

D. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi
Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawabnya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan pada satker lingkup DJPK untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan.

F. Kegiatan Pendukung

1. Rekonsiliasi SAKTI satker lingkup DJPK dan DJPRL dengan UAPPA-E1 Periode tahunan TA 2025 pada 12-15 Januari 2026
2. Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Satker lingkup DJPK pada 18 - 20 Februari 2026
3. Pemantauan Lanjutan Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen lingkup DJPK pada 25 – 27 Februari 2025
4. Pembahasan penetapan akun signifikan PIPK TA 2026 lingkup DJPK pada 12-13 Maret 2026
5. Monitoring Lanjutan Penyelesaian dan Percepatan TL Pengawasam APIP dalam rangka Penilaian TL Pengawasan APIP TW 1 TA 2026 lingkup DJPK pada 31 Maret 2026

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Menindaklanjuti seluruh temuan atas rekomendasi pengawasan APIP.

IK 2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Konservasi Ekosistem yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan:

$$X_{\text{penyelesaian}} = x \ 100\%$$

Keterangan:

- $X_{\text{penyelesaian}}$: Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
- A : Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK
- B : Jumlah nilai temuan BPK

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 2	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
0,08	-	-	-	-	-	<0,5	<0,5	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan tercapainya indikator ini didukung oleh komitmen seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal, dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan. Analisis keberhasilan lainnya juga didukung oleh koordinasi dengan Tim

Inspektorat I sebagai Mitra Direktorat Pengelolaan Kelautan terkait dokumen yang harus disiapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan pada satker lingkup DJPK untuk menunjang capaian pada indikator kinerja ini.

F. Kegiatan Pendukung

1. Entry meeting kegiatan reviu laporan keuangan PHLN lingkup DJPK pada 2 Februari 2026
2. Percepatan penyelesaian penyusunan dokumen kerugian negara PDDT PDLN TA 2023-2025 pada 9-11 Maret 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Menindaklanjuti seluruh temuan atas rekomendasi BPK
2. Memetakan sisa rekomendasi yang belum tuntas
3. Menyusun timeline penyelesaian seluruh rekomendasi
4. Koordinasi dengan penanggungjawab untuk penyelesaian rekomendasi

IK 3. Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. Capaian IK Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)
Triwulan I Tahun 2026**

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 3	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
77	-	-	-	-	-	77	80	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh telah ditetapkannya SK Tim yang mendukung pencapaian IKU ini dan tersusunnya rencana aksi pelaksanaan pencapaian pembangunan integritas.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK Nilai Pembangunan Integritas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IK Nilai Pembangunan Integritas DJPK yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026, antara lain:

1. Penetapan SK Tim Penanganan Konflik Kepentingan Tahun 2026
2. Penetapan SK Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2026
3. Penetapan SK Tim Penanganan Pengaduan Tahun 2026
4. Penetapan SK Tim Unit Pengendali Gratifikasi Tahun 2026
5. Pembahasan public campaign tentang pembangunan integritas di lingkungan DJPK
6. Penyusunan rencana aksi pembangunan integritas Tahun 2026
7. Audiensi ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Pendampingan dan pemantauan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Sosialisasi dan studi tiru keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
3. Pendampingan dan penilaian pelaksanaan inovasi

IK 4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; mendukung pencapaian prioritas nasional; merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Formula Perhitungan:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target.

- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah.
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 4		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
	94,28%	-	-	-	-	82%	85%	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025

Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dari tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja DJPK dalam pelaksanaan

kegiatan prioritas, adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implemantasi bantuan pemerintah, serta monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK ini adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam pelaksanaan program prioritas/strategis.

F. Kegiatan Pendukung

1. Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Desember 2025 (5 Januari 2026)>
2. Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Januari-Februari Tahun 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Melakukan pemantauan kegiatan prioritas lingkup DJPK yang termasuk kedalam kegiatan LAUT SEBASA, PROTEKSI, dan PELAUT.

IK 5. Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPK setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen

terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerja pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPK adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 7. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta

Predikat	Nilai	Interpretasi
		komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IK Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 5		Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
88,94	-	-	-	-	-	72	76	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025

Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan tercapainya IKU PM SAKIP ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPK dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPK.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

F. Kegiatan Pendukung

1. Pendetailan *Annual Work Plan (AWP)* LAUTRA 2026 (13 - 15 Januari 2026)
2. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPK Tahun 2026 (14 - 15 Januari 2026)
3. Pembahasan *Modeling Artificial Intelligence (AI)* lingkup DJPK (20 Januari 2026)
4. Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2026 lingkup DJPK (21 Januari 2026)
5. Pemaparan Detail Kegiatan & Anggaran AWP LAUTRA 2026 (21 Januari 2026)
6. Pembahasan Manual Indikator DJPK Tahun 2026 (23 Januari 2026)
7. Pendetailan AWP LAUTRA 2026 dan Persiapan MTR (23 Januari 2026)
8. Persiapan *Mid-Term Review (MTR)* Proyek LAUTRA (29 Januari 2026)
9. *Mid-Term Review Mission* LAUTRA (3-5 Februari 2026)
10. Konsolidasi Bahan MTR *Mission* LAUTRA (2 Februari 2026)

11. Pembahasan Kebutuhan Tenaga Pendukung PHLN LAUTRA (12 Februari 2026) Persiapan *Steering Committee Meeting* LAUTRA (18 Februari 2026)
12. *Steering Committee Meeting* LAUTRA (19 Februari 2026)
13. Tindak Lanjut Pertemuan *Steering Committee Meeting* LAUTRA (20 Februari 2026)
14. Tindak Lanjut Pembahasan Kebutuhan Tenaga Pendukung PHLN LAUTRA (20 Februari 2026)
15. Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Langkah Strategis Belanja K/L pada TA 2026 lingkup DJPK (24 Februari 2026)
16. Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Proses Pembukaan Blokir Anggaran lingkup DJPK TA 2026 (27 Februari 2026)
17. Rapat Pimpinan Lingkup DJPK : Evaluasi dan Pembahasan Rencana Kerja Bulan Maret (2 Maret 2026)
18. Pembahasan dokumen perencanaan kinerja tahun 2026 lingkup DJPK (5-6 Maret 2026) dan (10-11 Maret 2026)
19. Pembahasan updating *Annual Work Plan* Lautra TA 2026 (9 Maret 2026)

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPK Triwulan I Tahun 2026
2. Verifikasi Capaian Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026
3. Penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2025
4. Persiapan data AKIP dan PM SAKIP di lingkup DJPK.

IK 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sedangkan, konversi bobot bernilai

dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 9. Bobot Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai) Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 6		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
84,18	-	-	-	-	-	89,5	-	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target semesteran sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
 Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Pada Renstra DJPK 2025 – 2029 tidak terdapat indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Faktor keberhasilan yang mempengaruhi indikator kinerja ini yaitu, kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang mempengaruhi penilaian pada IKPA.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Setditjen PK serta terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh ASN serta memanfaatkan sarana dan prasarana baik itu secara online ataupun *hybrid* (online sekaligus offline).
- F. Kegiatan Pendukung
Pemantauan dan penyelesaian rekonsiliasi eksternal satker pusat dan UPT bulan Februari lingkup DJPK pada 23 Maret 2026.
- G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
1. Penyusunan dokumen perencanaan satker lingkup Ditjen PK Tahun 2027.
 2. Evaluasi Kegiatan Prioritas lingkup Ditjen PK Triwulan I Tahun 2026.
 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN.
 4. Pemantauan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2026 lingkup Ditjen PK.

IK 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan

Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 1 (Eselon I) 81,50

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 11. Bobot Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektifitas

1. Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan:

- CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
- RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2. Nilai Efektifitas Satker

$$Nef\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVROi}{TVROi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
RVROi : Realisasi Volume RO i
TVROi : Target Volume RO i
n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEF_{satker} \times WNEF_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
NEfsatker : Nilai Efektivitas Satker
NESatker : Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 12. Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026**

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
87,09	-	-	-	-	-	81,75	82,5	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator kinerja ini didukung dengan capaian kinerja anggaran pada unit kerja tingkat pusat. Secara teknis pelaporan, tidak ada kendala yang ditemui pada penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran karena, secara otomatis sudah terintegrasi dengan aplikasi pertanggungjawaban anggaran.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPK dan aplikasi berbasis website.
- F. Kegiatan Pendukung
 - 1. Evaluasi Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan Persiapan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2026 (10 Maret 2026)
 - 2. Pengisian Manual/Assessment Rincian Output (RO) TA. 2026 pada Aplikasi Monev Kemenkeu (30 Maret 2026).
- G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Pemantauan NKPA seluruh unit kerja di lingkup DJPK.

IK 8. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP

Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

Tabel 13. Kerangka Maturitas SPIP

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Formula Perhitungan:

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
 - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
 - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian IK Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai) Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 8		Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target
	3,896	-	-	-	-	-	3,6	3,9

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025

Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 pencapaian IKU ini melibatkan seluruh ASN dan Non ASN lingkup DJPK dengan didukung oleh sarana dan prasana yang memadai dalam kegiatan SPIP.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh ASN dan Non ASN di lingkup DJPK dengan sarana yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kebutuhan kegiatan SPIP.

F. Kegiatan Pendukung

Penyusunan Manajemen Risiko atas Penetapan Konteks Prioritas dan Manajerial serta Persiapan Pemantauan MR TA 2026 Lingkup DJPK pada 4 - 6 Maret 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Menyusun laporan SPIP pada periode berikutnya
2. Melakukan pemantauan MR dan kegiatan tahun 2026

IK 9. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas:

1. Probis Level 0;

2. Probis Level 1;
3. Probis Level 2; dan
4. Probis Level 3.

Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3.

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1.

Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.
5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Variabel 1 (V1) =

Probis Level 2 seluruhnya telah selesai disusun (15%), tidak selesai (0%).

Data dukung:

Hasil verifikasi dan persetujuan atas usulan Probis Level 2 dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 2 (V2) =

$$\frac{\text{jumlah Probis Level 3 yang selesai disusun dan telah di verifikasi}}{\text{jumlah Probis Level 3 yang harus disusun}} \times 40 \%$$

Data dukung:

Dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 3 (V3) =

Identifikasi Judul SOP seluruhnya telah selesai disusun (10%), tidak selesai (0%)

Data dukung :

Matriks Identifikasi Judul SOP berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 4 (V4) =

$$\frac{\text{jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi}}{\text{jumlah SOP yang harus disusun}} \times 25\%$$

Data dukung:

Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP.

Variabel 5 (V5) =

- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3 (5%);
- b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau
- c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data dukung :

- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
- b. Dokumen Probis Level 3 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

Variabel 6 (V6) =

- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (5%);
- b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data Dukung :

- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
- b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi

$$\text{Nilai Total} = V1+V2+V3+V4+V5+V6$$

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian IK Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 9	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
65	-	-	-	-	-	66	69	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa aspek yakni :
 - 1. Telah disusun matriks uraian fungsi seluruh Eselon II yang kemudian akan di cascading ke Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - 2. Telah tersusun sejumlah 30 Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
 - 3. Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien untuk percepatan antar Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan antar Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- F. Kegiatan Pendukung
 - 1. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan proses bisnis lingkup DJPK Tahun 2026
 - 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan SOP lingkup DJPK Tahun 2026
 - 3. Penyusunan Cross Function Map (CFM).
- G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Penyusunan SOP berdasarkan proses bisnis level II.

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi bobot nilai 25
 - b. Kompetensi bobot nilai 40
 - c. Kinerja bobot nilai 30; dan
 - d. Disiplin bobot nilai 5.
2. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:
 - a. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
 - SLTA Sederajat; dan
 - Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

NILAI	NAMA KUALIFIKASI	NILAI KUALIFIKASI
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- b. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh Pegawai (Bobot)					
				S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- c. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- d. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja ASN, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- e. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah

dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat..

No	Nama Hukuman Disiplin	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

3. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

4. Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:
 - a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan

- c. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
5. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 16. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)
Triwulan I Tahun 2026**

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 10		Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
	2025							
86,48	-	-	-	-	-	81	84	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target semesteran sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025

Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa aspek yakni :

1. Keaktifan seluruh pegawai di lingkup Ditjen PK dalam hal peningkatan kompetensi.
2. Sumber data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin. serta keaktifan seluruh pegawai lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dalam mengikuti peningkatan kompetensi dan juga melakukan peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu pegawai melalui riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

F. Kegiatan Pendukung

1. Penyusunan SKP pegawai lingkup DJPK
2. Pelaporan LHKPN dan LHKASN
3. Monitoring absensi pegawai lingkup DJPK
4. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi pegawai lingkup Ditjen PK
5. Pengisian SKP TW I
6. Penilaian SKP TW I
7. Pengusulan kenaikan pangkat periode TW I
8. Penyampaian usulan penghargaan Satya Lancana Karya Satya lingkup Ditjen PK Tahun 2026
9. Penyusunan usulan kebutuhan pengadaan ASN
10. Penyusunan formasi kebutuhan JF PELP dan APJK
11. Penyusunan perubahan peta jabatan lingkup Ditjen PK.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja BKN triwulan I tahun 2026.
2. Penilaian umpan balik 360⁰ aplikasi portal pegawai KKP.
3. Layanan usulan kenaikan pangkat pegawai lingkup DJPK.
4. Layanan usulan peningkatan kompetensi pegawai lingkup DJPK secara klasikal dan non-klasikal.
5. Monitoring presensi pegawai triwulan I tahun 2026 lingkup DJPK.

IK 11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional.

Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya.

Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %.
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase TKPD: } (30. X_1) + (40.X_2)+(30. X_3)$$

Adapun kriteria penilaiannya adalah :

Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)

Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)

Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)

Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

Rumus Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1):

$$\begin{aligned} & \sum KUSUKA \\ &= \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar. Termutakhirkan}}{\text{Total Target}} \right) \times 100 \end{aligned}$$

Rumus Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X_2):

$$X = \left(\frac{\text{Realisasi jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diinput}} \right)$$

Rumus Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X_3)

Nilai per eselon 1 =

$$\left(\frac{\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \right) \times 100$$

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 17. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)
Triwulan I Tahun 2026**

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 11		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
	2025							
91%	-	-	-	-	-	91%	91%	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh terlaksananya kegiatan dalam mendukung capaian indikator kinerja sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian indikator kinerja ini adalah pemanfaatan sistem Portal data KKP untuk pendataan dan validasi data KUSUKA petambak garam, IGT DJPK, dan produksi garam nasional.
- F. Kegiatan Pendukung
1. Terlaksananya Kegiatan Validasi Produksi Garam Tahun 2025
 2. Penyampaian Hasil Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT Biota Perairan Dilindungi
 3. Penyampaian Hasil Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil
- G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Monitoring Triwulan II Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

IK 12. Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 ttg Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023.

Formula Perhitungan :

Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77.

Capaian hasil dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{N1 + N2 + N...}{\text{Total N}}$$

Keterangan :

N1 : Nilai Proposal 1

N2 : Nilai Proposal 2

N~ : Nilai Proposal 3 dst

Total N : Jumlah Proposal yang diajukan

Nilai capaian : capaian hasil

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian IK Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 12		Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
	77,55	-	-	-	-	78	81	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
 Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik.

Kendala

Kendala yang dialami pada indikator kinerja ini yakni terkait penerapan inovasi masih kurang implementatif di lingkup DJPK.

Solusi

Solusi yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan replikasi inovasi yang lebih implementatif di lingkup DJPK.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPK adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja dan mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPK, adalah

1. Penetapan Kepdirjen tentang Inovasi Pelayanan Publik lingkup DJPK Tahun 2026
2. Asistensi penyusunan proposal inovasi lingkup DJPK
3. Pendataan inovasi pelayanan publik DJPK 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Melakukan pengumpulan inovasi pelayanan publik
2. Melakukan pembahasan inovasi pelayanan publik
3. Melakukan penilaian inovasi pelayanan publik.

IK 13. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2026, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Formula Perhitungan :

$$\text{Persentase Penyelesaian Progsun Permen Kepmen (Unit Organisas Es1)} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

B = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

Tabel 19. Capaian IK Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 13	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target	% Capaian

		capaian 2025			Target PK			
100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Belum terdapat capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2026 karena frekuensi pengukurannya secara semesteran. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2025, tercantum bahwa Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan terdiri atas 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri dan 5 (lima) Rancangan Keputusan Menteri, yang meliputi:

1. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah;
2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Adaptasi Perubahan Iklim;
3. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2030;
4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut;
5. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi; dan
6. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Status Perlindungan Jenis Ikan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa

dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis keberhasilan:

1. Melakukan pembahasan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri secara intensif.
2. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyusunan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri.

Analisis Kendala:

1. Jumlah sumber daya yang minim berbanding terbalik dengan beban pekerjaan sehingga sering terjadi overload pekerjaan/burn out.
2. Anggaran yang kecil akibat adanya efesiensi anggaran tidak sebanding dengan beban pekerjaan.

Solusi:

1. Perlu dilakukan penambahan jumlah sumber daya manusia baik melalui tenaga kerja magang/kontrak ataupun penerimaan ASN (PNS/P3K).
2. Perlu memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai mempertimbangkan semakin tingginya inflasi yang terjadi di Indonesia.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kelautan. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yakni ASN DJPK, ASN lintas unit eselon I KKP, lintas sektor K/L yang terkait substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.

F. Kegiatan Pendukung

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan perikanan tanggal 6 Januari 2026.
2. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil

Sedimentasi di Laut (batang Tubuh dan Lampiran Angka I dan II) tanggal 12 Januari 2026.

3. Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam tanggal 14 s.d 15 Januari 2026.
4. Pembahasan Koordinasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik tanggal 14 Januari 2026.
5. Pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan tanggal 19 Januari 2026.
6. Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan tanggal 20 s.d 22 Januari 2026.
7. Pembahasan Pendalaman Materi Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koservasi Sumber Daya Ikan tanggal 26 Januari 2026.
8. Pembahasan Lanjutan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Januari 2026.
9. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan tanggal 3 Februari 2026.
10. Pembahasan Lanjutan ke 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik tanggal 4 Februari 2026.
11. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Februari 2026.
12. Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan Atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan tanggal 19 Februari 2026.
13. Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan tanggal 25 s.d 27 Februari 2026.
14. Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan Atas Permen KP Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan tanggal 3 Maret 2026.

15. Pembahasan Kick Off Meeting Rancangan Perpres tentang Jakstranas Percepatan Pengelolaan Sampah tanggal 3 Maret 2026.
16. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Sempadan Pantai tanggal 4 Maret 2026.
17. Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan tanggal 6 Maret 2026.
18. Pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) tanggal 12 Maret 2026.
19. Pembahasan Koordinasi Penyusunan RAN Konservasi Hiu dan Paus Periode 2026-2029 tanggal 12 Maret 2026.
20. Pembahasan penyusunan dua Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penetapan Kawasan Konservasi tanggal 30 Maret 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah.
2. Pembahasan Teknis Rancangan Perpres Jakstranas terkait Penanganan Sampah Laut.
3. Pembahasan Rancangan Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Sektor Kelautan.
4. Pembahasan Lanjutan ke 3 Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Terkait Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik.
5. Pembahasan PAK Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah.
6. Pembahasan Penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus Periode 2026 – 2029.

IK 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban

Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar,

rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a) penciptaan arsip (25%),
 - b) penggunaan arsip (25%),
 - c) pemeliharaan arsip (25%),
 - d) penyusutan arsip (25%)
- 2) Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a) sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b) prasarana dan sarana (50%)

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IK Pengawasan Kearsipan Internal DJPK Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 14		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
	97,38	-	-	-	-	81	84	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
 Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif dengan memenuhi 5 komponen indikator dalam aspek penilaian SAQ Monev KIP oleh tim penilai internal KKP diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana dan prasarana, kelembagaan, digitalisasi. Masing-masing komponen indikator mempunyai bobot penilaian masing-masing yang akan ditentukan oleh tim penilai internal KKP.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Setditjen PK serta terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh ASN serta memanfaatkan sarana dan prasarana baik itu secara online ataupun hybrid (online sekaligus offline).

F. Kegiatan Pendukung

1. Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) 2026 yang diselenggarakan oleh ANRI.
2. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI.
3. Pembahasan pelaksanaan pengumpulan berkas-berkas yang menjadi objek pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PK.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Verifikasi dan Klarifikasi Instrumen unit kearsipan.
2. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2026.

IK 15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan

PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%) Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 15		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
100%	76%	-24%	102,70%	74%	98,70%	77%	80%	95%

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 99,48% dari target Triwulan I 74%. Capaian tersebut diperoleh dari nilai rata-rata persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP seluruh satker lingkup DJPK (5 Satker).

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2025
Jika capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 maka, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 hal ini disebabkan oleh, aspek nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, masih belum berhasil melampaui target Renstra dengan persentase capaian sebesar 95%.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Pada Triwulan I tahun 2026 telah terdapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pengelola aplikasi di masing-masing Satker yang telah mengumumkan RUP sesuai dengan pagu pengadaan pada aplikasi SiRUP, sehingga dapat memperoleh nilai diatas target.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam pencapaian target IKU ini, efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan operator SIRUP dari masing-masing Satker lingkup DJPK.
- F. Kegiatan Pendukung
Update aplikasi SIRUP paket pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PK Triwulan I Tahun 2026.
- G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Update aplikasi SIRUP paket pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PK Triwulan II Tahun 2026 secara rutin dengan mencermati revisi DIPA/RKAKL yang sudah dilakukan.

IK 16. Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi.

Formula perhitungan

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
- 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
- 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
- 4) Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80% dan presentasi sebanyak 20%.
- 5) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

Tabel 22. Nilai dan Predikat atas Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

No	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 23. Capaian IK Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)
Triwulan I Tahun 2026**

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 16	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
100	-	-	-	-	-	92	95	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian ini didukung oleh Seluruh unit kerja lingkup DJPK dengan menjalankan pelayanan kegiatan dan administrasi permohonan Informasi dan Data sesuai dengan ketentuan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PK sesuai dengan SK Tim PPID Ditjen PK Tahun 2026.

F. Kegiatan Pendukung

1. Penerbitan SK Tim PPID Ditjen PK 2026;
2. Pelayanan permohonan Informasi dan Data lingkup DJPK;
3. Melakukan Updating pada website DJPK.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Pelayanan permohonan Informasi dan Data lingkup DJPK;
2. Pembahasan dan penyusunan DIP dan DIK Tahun 2026
3. Melakukan updating website DJPK secara berkala.

IK 17. Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada e.Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan meliputi kerjasama nasional dan internasional. Kerja Sama nasional meliputi kerja sama yang dilakukan DJPK dengan Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, dan organisasi/lembaga asing. Untuk mencapai sasaran dan target program Pengelolaan Kelautan, DJPK memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai

bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Pengelolaan Kelautan. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Untuk menentukan capaian pelaksanaan kerja sama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1), Bobot Nilai 40%.
2. Persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2), Bobot Nilai 30%.
3. Persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3), Bobot Nilai 30%.

Persentase pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan:

$$X1 (40\%) + X2 (30\%) + X3 (30\%) = 100\%$$

- Variabel persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1) dengan rumus: $(a) / b \times 100\%$
Keterangan: a = Dokumen kerja sama yang ditandatangani; b = Dokumen kerja sama yang diusulkan
- Variabel persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2) dengan rumus: $(a) / b \times 100\%$
Keterangan: a = Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun; b = Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional
- Variabel persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3) dengan rumus: $(a) / b \times 100\%$

Keterangan: a = Capaian output setiap kegiatan (renaksi) b = Target output setiap kegiatan (renaksi)

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IK Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	
IK – 17	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029

2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
100	-	-	-	-	-	100%	-	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang memiliki secara tahunan sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 tidak memiliki target namun, hingga Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan penandatanganan 5 (lima) dokumen kerja sama program pengelolaan kelautan, yaitu :

- 1) Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan Yayasan BIONESIA pada 30 Januari 2026;
- 2) PKS antara DJPK dan Yayasan Samudera Indonesia Timur (YASIT) pada 5 Februari 2026;
- 3) PKS antara Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan DJPK pada 11 Februari 2026;
- 4) PKS antara DJPK dan Yayasan KEHATI pada 5 Maret 2026; dan
- 5) PKS antara DJPK dan Yayasan EcoNusa pada 6 Maret 2026.

Selain itu, hingga Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan penyusunan bahan kertas posisi Indonesia untuk partisipasi Delegasi DJPK pada pertemuan kerja sama internasional sebagai berikut:

- 1) *World Economic Forum 2026* di Davos, Swiss, 18-23 Januari 2026;
- 2) *the Sulu-Sulawesi Seascapes (SSS) Sub-Group's 2nd Dialogue di Manila, Filipina*, 10-11 Maret 2026;
- 3) *Third Session of Preparatory Commission (PrepCom III) Agreement of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement)* di New York, Amerika Serikat, 23 Maret - 2 April 2026

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Tidak ada target dan indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati pada Rencana Strategis DJPK 2025-2029.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

Beberapa faktor keberhasilan dari indikator kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PK sebagai pemrakarsa kerja sama program PK dalam proses penyusunan naskah kerja sama.
2. Proses penandatanganan dokumen kerja sama program PK dilakukan secara *desk to desk*.

Kendala

1. Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.
2. Proses reviu dan pengesahan naskah final dokumen PKS yang telah dibahas para pihak membutuhkan waktu lebih lama.

Solusi

1. Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.
2. Proses reviu dan pengesahan naskah final dokumen PKS yang telah dibahas para pihak membutuhkan waktu lebih lama.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPK.

F. Kegiatan Pendukung

1. Koordinasi peninjauan kerja sama/audiensi dan pembahasan rancangan naskah kerja sama antara DJPK dengan mitra pada Januari - Maret 2026;
2. Pelaksanaan penandatanganan PKS lingkup DJPK pada Januari - Maret 2026;
3. Forum Diskusi Penguatan Kerja Sama DJPK Tahun 2026 pada 24 Februari 2026;

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026 akan dilakukan kegiatan Koordinasi pembahasan penyusunan rancangan naskah kerja sama program pengelolaan kelautan dan pelaksanaan penandatangannya.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PK tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPK pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPK. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PK Tahun 2026 adalah Rp58.143.504.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PK mencapai Rp13.230.668.997 dengan persentase sebesar 22,76%.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PK, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Tahun 2026 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PK dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PK terdapat 17 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PK. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 sebesar **112,74 (Istimewa)**.

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target berdasarkan target tersebut 2 inikator kinerja berhasil tercapai yakni Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%) dengan capaian 85,44 serta Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%) dengan capaian 99,48.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	Triwulanan	81	81	85,44	105,48
	2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan	Tahunan	-	<0,5	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
		BPK-RI atas LK DJPK (%)					
	3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	Tahunan	-	76	-	-
	4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	Tahunan	-	81	-	-
	5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	70	-	-
	6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai)	Semesteran	-	89	-	-
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	Tahunan	-	81,5	-	-
	8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	3,5	-	-
	9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	Tahunan	-	65	-	-
	10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	Semesteran	-	80	-	-
	11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	Tahunan	-	91	-	-
	12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	77	-	-
	13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan	Semesteran	-	100	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
		Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)					
	14 .	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	Tahunan	-	80	-	-
	15 .	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	Triwulanan	74	76	99,48	120
	16 .	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	91	-	-
	17 .	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PK Tahun 2026 adalah Rp58.143.504.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PK mencapai Rp13.230.668.997 dengan persentase sebesar 22,76%.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PK, direkomendasikan perbaikan antara lain:

1. Melakukan percepatan penyelesaian sisa tindak lanjut hasil pengawasan APIP melalui penguatan monitoring berkala, penetapan target waktu penyelesaian, serta peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan akuntabel.
2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar Tim Kerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala, penguatan komunikasi internal, serta penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

guna mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja organisasi.

3. Melakukan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai dasar pengambilan langkah percepatan maupun penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Pada Tahun 2025 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan IV Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan integrasi perencanaan dan anggaran kinerja DJPK	Telah dilaksanakan integrasi perencanaan penganggaran periode tahun anggaran 2026 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan kelautan melalui penetapan Rencana Kerja Tahunan 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2026 dan Penetapan DIPA DJPK TA 2026 melalui Surat Penetapan No: SP DIPA-032.07.1.622145/2026 tanggal 1 Desember 2025.
2.	Melaksanakan forum konsolidasi lingkup DJPK untuk penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada masa mendatang	Telah dilakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman terkait indikator kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan DJPK melalui dialog kinerja organisasi yang melibatkan seluruh pejabat dan pegawai baik satker pusat dan UPT lingkup DJPK pada tanggal 21 Januari 2026



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditiengk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Miftahul Huda**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

++
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK)	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PK (%)	81
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PK (%)	<0,5
		3.	Nilai pembangunan integritas Ditjen PK (Nilai)	77
		4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Program Prioritas/Strategis lingkup Ditjen PK (%)	82
		5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PK (Nilai)	72
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PK	89,5
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PK (Nilai)	81,75
		8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP Ditjen PK (Nilai)	3,6
		9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PK (%)	66
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PK (Indeks)	81
		11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PK (%)	91
		12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PK (Nilai)	78
		13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	100
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PK (Nilai)	81
		15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PK (%)	77
		16.	Nilai keterbukaan informasi publik Ditjen PK (Nilai)	92
		17.	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	66.013.084.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026		66.013.084.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda